ASKOMPSI Minta DBH Frekuensi Diberikan Kepada Pemda

Senin, 9 Mei 2022

Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) Frekuensi diberikan kepada pemerintah daerah. Ketua ASKOMPSI, Sudarman, menyampaikan usulan ini dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). ASKOMPSI berpendapat bahwa DBH Frekuensi yang selama ini dipungut langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) seharusnya dibagikan kepada pemerintah kota/kabupaten.

ASKOMPSI berharap APPSI mendukung usulan tersebut dan memasukkannya sebagai prioritas dalam penambahan komponen DBH Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah, yang mencantumkan potensi DBH SDA Frekuensi yang besar.

Potensi DBH Frekuensi terus meningkat seiring dengan proses transformasi digital yang semakin cepat. Kemenkominfo merupakan salah satu penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi di sektor non-migas selama periode 2015-2020, dan pendapatan tersebut berasal dari hak penyelenggaraan telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio.

ASKOMPSI berpendapat bahwa Pemda memerlukan DBH SDA Frekuensi untuk memperkuat dukungan dalam target percepatan pembangunan Transformasi Digital yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Percepatan transformasi digital di daerah merupakan kewajiban yang membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Pusat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.